



# LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PASAMAN

TAHUN 2024

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat karunia-Nya sehingga dapat kami selesaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2024. Laporan monitoring kinerja ini disusun sebagai wujud akuntabilitas keuangan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Laporan monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV ini memuat segala transaksi kinerja dan keuangan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman. Laporan realisasi penyerapan anggaran disajikan sebagai output laporan pencapaian target kinerja pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan tenaga dan pikirannya dalam rangka penyusunan laporan ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya kepada semua pihak yang menaruh perhatian terhadap penyusunan laporan ini, kami sangat mengharapkan kritik dan saran perbaikan untuk penyempurnaannya dimasa yang akan datang.

**KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR  
KABUPATEN PASAMAN**

**AAN AFRINALDI, S.STP, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19830415 200212 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Maksud dan Tujuan	1
	1.2 Landasan Hukum	1
BAB II	KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PASAMAN	3
	2.1 Kebijakan Keuangan	3
	2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	3
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman	13
	3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan	18
BAB IV	PENUTUP	20

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tiap triwulannya pada Tahun Anggaran 2024;
2. Memperbandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman adalah :

1. Menyajikan informasi yang bermamfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan;
2. Menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD per triwulan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2024.

### **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2024 diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur Keuangan Daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman;

7. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman;
8. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

**BAB II**  
**KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN PASAMAN**

**2.1 Kebijakan Keuangan**

Dalam rangka tersebar luasnya informasi pengembangan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman mengemban tugas yang cukup besar sebagai Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

**2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Indikator pencapaian keberhasilan, secara garis besar Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2024, terdiri dari:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

**a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dianggarkan dana sebesar Rp. 7.988.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.741.500,- presentase realisasi anggaran sebesar 59,36% dan realisasi fisik 100%. Adapun indikator pencapaian target sub kegiatannya adalah terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah : RKA, DPA, RENJA dan RENSTRA

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dianggarkan dana sebesar Rp. 7.642.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.424.000,- presentase realisasi anggaran sebesar 44,80% dan realisasi fisik 100%. Adapun indikator pencapaian target sub kegiatannya adalah terlaksananya penyusunan laporan tahunan pada Satpol. PP dan Damkar

**b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dianggarkan dana sebesar Rp. 2.897.627.912,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.823.562.769,- presentase realisasi anggaran sebesar

97,44% dan realisasi fisik 100% untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Dianggarkan dana sebesar Rp. 93.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 85.415.000,- presentase realisasi anggaran sebesar 91,84% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pembayaran honorarium pengelola keuangan SKPD.

**c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dianggarkan dana sebesar Rp. 760.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- presentase realisasi anggaran sebesar 0,-% dan realisasi fisik 0%.

**d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Dianggarkan dana sebesar Rp. 5.060.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.905.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 96,94% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya kebutuhan kantor akan komponen atau alat-alat listrik untuk kebutuhan kantor.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dianggarkan dana sebesar Rp. 18.902.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.269.500,- Presentase realisasi anggaran sebesar 59,62% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya kebutuhan kantor berupa atk.

3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dianggarkan dana sebesar Rp. 12.050.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.422.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 78,19% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya kebutuhan kantor akan barang cetak dan penggandaan, serta pembuatan spanduk untuk kegiatan hari besar nasional dan keagamaan.

4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

Dianggarkan dana sebesar Rp. 3.501.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.040.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 86,83% dan realisasi fisik 100% . Kegiatan ini berupa tagihan bahan bacaan berupa koran

baik harian maupun mingguan, sehingga pegawai dapat menikmati bahan bacaan di kantor.

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dianggarkan dana sebesar Rp. 126.699.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 113.866.850,- Presentase realisasi anggaran sebesar 89,87% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi baik di dalam daerah maupun di luar daerah, dan luar provinsi.

**e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

Dianggarkan dana sebesar Rp. 31.828.832,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.960.304,- Presentase realisasi anggaran sebesar 69,00% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pembayaran tagihan air, listrik dan telepon.

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dianggarkan dana sebesar Rp. 1.463.304.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.315.661.080,- Presentase realisasi anggaran sebesar 89,91% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pembayaran honorarium tenaga kontrak, honor daerah serta pembayaran tagihan JKK dan JKM.

**f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dianggarkan dana sebesar Rp. 164.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 133.530.900,- Presentase realisasi anggaran sebesar 81,42% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pembayaran pajak, pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas baik roda 2, roda 4 dan roda 6 (non hidrolik).

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dianggarkan dana sebesar Rp. 730.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- Presentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik

100% yaitu terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor berupa instal komputer.

- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Dianggarkan dana sebesar Rp. 2.604.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.573.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 98,81% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pemeliharaan gedung kantor berupa pengecatan dan perawatan gedung kantor.
  
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
Dianggarkan dana sebesar Rp. 5.660.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.600.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 98,94% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pemeliharaan meja kantor, lemari kantor dan rak arsip kantor .

## **2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

### **a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan  
Anggaran sebesar Rp. 478.795.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 433.312.950,- persentase realisasi anggaran sebesar 90,50% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah :
  - Terlaksananya patroli / monitoring ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak 40 kali, penegakan disiplin ASN sebanyak 10 kali, penertiban kekayaan daerah sebanyak 10 kali, Pengawasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 22 kali kegiatan, penertiban penegakan Disiplin anak sekolah sebanyak 20 Kali penertiban dan Pengamanan Natal / operasi lilin singgalang 2024 berjumlah 8 hari kegiatan.
  - Pada tahun ini juga dilaksanakan penempatan BKO Kecamatan berdasarkan surat Perintah Kasat Pol. PP & Damkar sebanyak 10

Kecamatan yang terdiri atas 2 orang per Kecamatan dengan jumlah 20 orang dengan tugas utama penertiban /penegakan disiplin anak sekolah dan tugas lain sesuai dengan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- Terlaksananya juga pengamanan masjid pada hari jumat di Kecamatan Lubuk Sikaping oleh Pol PP wanita di 4 (empat) titik dari bulan Januari 2024. sampai dengan bulan Desember 2024 yaitu : Masjid Al-Mutaqqin, Masjid Raya Pauah Durti, Masjid Raya Tj. Beringin, Masjid Al-Yatim
  - Terlaksananya juga pengamanan (Piket) di beberapa titik gedung milik Pemerintah Daerah yang berada di Kecamatan Lubuk Sikaping dengan personil berjumlah 16 orang dalam 1 (satu) hari di beberapa tempat.
- 2) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa Anggaran sebesar Rp. 11.856.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.825.600,- persentase realisasi anggaran sebesar 99,74% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah : Terlaksananya operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) sebanyak 18 kali kegiatan dan Operasi Warung Kelambu (WARKEL) pada bulan suci Ramadhan berjumlah 12 kali kegiatan.
- 3) Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota  
Anggaran sebesar Rp. 105.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- persentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar 0%.
- 4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Anggaran sebesar Rp. 494.110.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 457.690.300,- persentase realisasi anggaran sebesar 92,63% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah :

- Pelaksanaan peran Satlinmas dalam pemantauan situasi menjelang pemilu serentak 2024, agar dapat segera mungkin memberikan informasi guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
  - Telah dilaksanakan kegiatan pengamanan pelaksanaan pemilu (pilpres dan pileg)
  - Telah dilaksanakan pembentukan satlinmas pada tiap-tiap TPS guna menjadi petugas ketertiban TPS 2024 di 12 kecamatan dalam lingkup Kab. Pasaman
  - Telah melaksanakan monitoring kantibmas dalam rangka pasca pelaksanaan pilkada serentak 2024
  - Cipta kondisi tibumtranmas 2024
  - Telah dilaksanakan pengamanan pilkada serentak 2024
- 5) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- Anggaran sebesar Rp. 19.765.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.528.700,- persentase realisasi anggaran sebesar 98,80% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah :
- Telah dilaksanakan acara Ulang Tahun Satpol PP Tingkat Nasional ke-74 dan Satlinmas ke- 62 di Kota Padang
  - Telah dilaksanakan koordinasi dengan Satpol. PP Provinsi dan Kab/Kota di Sumbar serta dengan Satpol. PP Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau terkait batas wilayah tentang Trantibum dan Penegakan Perda di daerah terpencil.
- 6) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada Anggaran sebesar Rp. 60.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- persentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar 0%. Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah :
- Telah memberikan layanan optimal baik informasi maupun penegakan dalam penegakan perda
  - Telah memberikan sosialisasi terkait dengan dampak penegakan Perda

- Telah melaksanakan kunjungan ke tiap-tiap kecamatan guna koordinasi dengan Kasi Trantibum terkait dengan layanan dampak penegakan perda itu sendiri.
- Tersedia dana pada TW 1 –TW 3 kemudian pada TW. IV anggaran di geser ke kegiatan lain karena dana pada kegiatan ini tidak terpakai maksimal karena dalam tahun 2024 tidak terdapat ganti rugi maupun layanan dampak dari penegakan Perda/Perbup itu sendiri.

**b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**

- 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota  
 Anggaran sebesar Rp. 87.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- persentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar 0%. Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah untuk tahun ini tidak terlaksananya sosialisasi penegakan Perda dan Perbup dikarenakan tidak tersedianya dana di DPA secara optimal.
- 2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota anggaran sebesar Rp. 15.462.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.059.000,- persentase realisasi anggaran sebesar 97,39% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah : Terlaksananya Operasi Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dengan menertibkan Perda nomor 12 tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum berjumlah 30 kali kegiatan, Izin usaha Warung Internet (WARNET) dan Izin Usaha Depot Air Minum dengan jumlah keseluruhan 8 Kali kegiatan, Pajak Reklame, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan jumlah keseluruhan 15 Kali kegiatan, kegiatan tersebut terlaksana sampai bulan Desember 2024.
- 3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota anggaran sebesar Rp. 105.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- persentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar 0%. Untuk tahun 2024 sub kegiatan tersebut tidak dapat

terlaksana karena tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

**3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran**

**a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**

1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp. 175.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- persentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar 0%.

Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah :

- Terlaksananya pemetaan daerah rawan kebakaran di kecamatan se Kabupaten Pasaman.
- Terlaksananya pemeriksaan dan pemungutan retribusi Apar (racun api ringan) di perkantoran, sekolah, rumah sakit, SPBU dan gedung pertokoan serta tempat usaha lainnya.
- Terlaksananya pemberian rekomendasi izin terhadap perumahan yang ada di Kabupaten Pasaman.
- Terlaksananya survei titik-titik air di Kecamatan se Kabupaten Pasaman yang akan memudahkan anggota menemukan air apabila terjadi kebakaran di daerah tersebut.
- Terlaksananya pengecekan rutin kesiapsiagaan personil pemadaman kebakaran di posko-posko.

2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Anggaran sebesar Rp. 590.453.200,- dengan realisasi sebesar Rp.477.368.000,- persentase realisasi anggaran sebesar 80,85% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah :

- Terlaksananya pemadaman kebakaran yang terjadi sebanyak 34 kali di Kabupaten Pasaman.

- 3) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran  
Anggaran sebesar Rp.175.700,- dengan realisasi sebesar Rp.0,-  
persentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar  
0%. Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah :
- Terlaksananya penyemprotan daerah bekas banjir di Kecamatan Tigo Nagari, Lubuk Sikaping, Bonjol, Rao Selatan.
  - Terlaksananya evakuasi hewan berbisa seperti ular, tawon, biawak, anjing liar dll (animal rescue) sebanyak 75 kali dan pemotongan cincin 1 kali.
- 4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga  
Anggaran sebesar Rp.76.900,- dengan realisasi sebesar Rp.0,-  
persentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar  
0%. Sub kegiatan tetap dilaksanakan yang anggaran dibebankan pada  
si pemohon. Indikator pencapaian target sub kegiatan tersebut adalah
- Terlaksananya pelatihan pencegahan kebakaran dini terhadap 6 kegiatan dengan jumlah peserta 80 orang
  - Masyarakat mengerti dan paham akan cara penanggulangan dini kebakaran

**b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**

- 1) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran  
Anggaran sebesar Rp.162.800,- dengan realisasi sebesar Rp.0,-  
persentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar  
0%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :
- Terlaksananya pengecekan sarana dan prasarana secara rutin.
  - Terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak atau tidak berfungsi.

**c. Investigasi Kejadian Kebakaran**

- 1) Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian  
Penyebab Kejadian Kebakaran

Anggaran sebesar Rp.70.300,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- persentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar 0%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :

- Diketahui penyebab terjadinya kebakaran
- Diketahui jumlah korban dari kebakaran yang terjadi
- Diketahui jumlah kerugian yang dialami oleh korban kebakaran

**d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**

- 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.71.708.550,- persentase realisasi anggaran sebesar 71,71% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah : Telah dilaksanakan pelatihan penanggulangan dini kebakaran bagi masyarakat sebanyak 6 kegiatan dengan jumlah peserta 40 orang

- 2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran anggaran sebesar Rp.64.100,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- persentase realisasi anggaran sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar 0%. Sub kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan tidak tersedianya dana di DPA secara optimal.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman**

Ringkasan anggaran dan realisasi Program/Kegiatan berdasarkan DPA SKPD pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2024 (setelah perubahan) Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 6.555.189.144,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 6.025.465.003,- (91,92%). Secara ringkas dapat kami uraikan dalam Tabel dibawah ini:

**Urusan/Program/Kegiatan, Anggaran dan Realisasi TW IV**  
**Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2024**

No	Urusan / Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.988.200,-	4.741.500,-	59,36
		b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.642.500,-	3.424.000,-	44,80
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.897.627.912,-	2.823.562.769,-	97,44
		b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.000.000,-	85.415.000,-	91,84
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			

		a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	760.000,-	0,-	0
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.060.000,-	4.905.000,-	96,94
		b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.902.500,-	11.269.500,-	59,62
		c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.050.000,-	9.422.000,-	78,19
		d. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	3.501.000,-	3.040.000,-	86,83
		e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.699.200,-	113.866.850,-	89,87
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.828.832,-	21.960.304,-	69,00
		b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.463.304.000,-	1.315.661.080,-	89,91
		6. PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional	164.000.000,-	133.530.900,-	81,42

		atau Lapangan			
		b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000,-	0,-	0
		c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.604.000,-	2.573.000,-	98,81
		d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.660.000,-	5.600.000,-	98,94
II	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	478.795.600,-	433.312.950,-	90,50
		b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	11.856.600,-	11.825.600,-	99,74
		c. Koordinasi	105.000,-	0,-	0

		penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten /kota			
		d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	494.110.000,-	457.690.300,-	92,63
		e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Plekasanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	19.765.300,-	19.528.700,-	98,80
		f. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	60.400,-	0,-	0
		2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota			
		a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	87.800,-	0,-	0
		b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	15.462.600,-	15.059.000,-	97,39
		c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	105.000,-	0,-	0

III	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	175.700,-	0,-	0
		a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Kabupaten/Kota	590.453.200,-	477.368.000,-	80,85
		b. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran	175.700,-	0,-	0
		c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.304.000,-	0,-	0
		d. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	76.900,-	0,-	0
		2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			
		a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	162.800,-	0,-	0
		3. Investigasi Kejadian Kebakaran			
		a. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	70.300,-	0,-	0
		4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
		a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan	100.000.000,-	71.708.550,-	71,71

		Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	64.100,-	0,-	0
--	--	--	----------	-----	---

### 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan

Dalam pelaksanaan anggaran 2024, secara umum terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman yaitu :

#### 1) hambatan

Pada tahun 2024 ada beberapa hambatan yang dihadapi sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai secara maksimal, masalah tersebut antara lain :

- Kekurangan kendaraan operasional berupa alat angkut (mobilisasi) yang bisa membawa personil dalam operasi penertiban dan pengamanan.
- Anggaran operasi dan penertiban masih belum memadai sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang efektif.
- Kurangnya ASN terutama PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada.
- Rendahnya SDM ASN dan kurangnya anggaran Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang berdaya guna dan berhasil guna.
- Kurangnya posko Pemadam Kebakaran dan sarana prasarana operasional pemadam kebakaran

## 2) Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman telah mengambil langkah-langkah antisipatif antara lain:

- Diperlukan adanya alat angkut (mobilisasi)
- Penambahan anggaran operasi dan penertiban
- Penambahan PNS untuk Satpol PP dan Damkar.
- Adanya pelatihan atau diklat dan penambahan anggaran.
- Penambahan posko Pemadam Kebakaran sehingga respon time 15 menit dapat terlaksana dan penambahan sarana prasarana operasional pemadam kebakaran

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman diharapkan dapat memberikan informasi keuangan untuk mengukur kinerja pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.

Demikianlah laporan monitoring evaluasi kinerja ini dibuat untuk dapat menjadikan acuan dalam evaluasi kinerja sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Lubuk Sikaping, Januari 2025  
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR  
KABUPATEN PASAMAN

**AAN AFRINALDI, S.STP, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19830415 200212 1 001